

DESINTEGRASI

(Suatu Tinjauan Sosiologis)



Oleh: Dahlan Hi. Hasan¹

ABSTRAK

Awalnya kita begitu yakin bahwa Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika dianggap mampu merajut perbedaan yang ada sehingga menjadi pilihan terbaik dari sekian banyak Ideologi pada saat itu, dan dalam perjalanan bangsa ini kita menyaksikan adanya dukungan masyarakat, setidaknya pada tataran elit, interaksi antara mereka yang berbeda suku bangsa, agama dan golongan dengan mudah biasa dirajut. Terlebih dengan tingkat pendidikan memiliki korelasi yang kuat terhadap tumbuhnya semangat saling bisa memahami perbedaan-perbedaan pandangan, seperti yang ditunjukkan kerjasama antar suku bangsa yang berbeda, dengan mudah bisa dilakukan dengan pertimbangan yang rasional. Tetapi kita dikagetkan dengan adanya gejala desintegrasi yang dimulai pada lapisan "Grassroot" dimana konvergensi antara suku bangsa, agama yang berbeda sudah tidak mudah diciptakan, walaupun ada (yang sudah terbentuk) bisa ditelusuri, bahwa realitas semacam itu berakar pada tradisi yang sudah cukup lama, ketika intervensi state belum terlampaui banyak mempengaruhi mereka.

Kata Kunci: Desintegrasi, Konflik, Sosiologis

PENDAHULUAN

Keragaman, terlebih dikaitkan dengan integrasi dan konflik dalam atmosfer sosio-politik Indonesia adalah sebuah terminology yang penuh problematik. Tidak saja ia mencerminkan labirin persoalan dipermukaan tetapi juga menyimpan endapan emosi yang amat eksplosif. Rezim Orde Baru pada satu sisi berhasil mereduksi benih ketegangan dan konflik hingga pada titik paling minimal, namun disisi lain tetap tidak mampu mengeliminasi inti masalah yang sebenarnya.

Beberapa kasus kerusakan, yang demikian berlarut-larut adalah bukti riil betapa telah terjadi upaya sistematis serta rekayasa membelokkan ruang isu dari horizontal semata menjadi vertikal. Ironisnya fakta demikian tetap saja dicover up sebagai kejadian biasa yang secara potensial bisa terjadi dimana saja di wilayah Indonesia.

Jika realitas ini terus berlanjut, yang rugi bukan hanya orang perorang, kelompok orang dalam lingkup suku bangsa, agama dan golongan tertentu saja akan tetapi juga mencakup komunitas kita sebagai bangsa. Itu juga menunjukkan bahwa solusi

¹ Staf Pengajar Pada Jurusan Sosiologi Fisip Universitas Tadulako

persoalannya bukan hitam putih. Hal yang amat urgen dilakukan adalah bagaimana menciptakan suasana kondusif bagi semua pihak agar pluralis masyarakat Indonesia bukan hanya retorika para pejabat maupun para pemimpin agama dan golongan, namun lebih mendarat pada tataran realitas praktis.

Pada tataran elit interaksi antara mereka yang berbeda suku bangsa, agama dan golongan mungkin dengan mudah biasa diciptakan, sebab tingkat pendidikan memiliki korelasi yang kuat terhadap tumbuhnya semangat saling bisa memahami perbedaan-perbedaan pandangan hingga pada yang paling ekstrim sekalipun. Meski tidak semuanya, tetapi sebagian besar kerjasama antar suku bangsa yang berbeda, dengan mudah bisa dilakukan dengan pertimbangan yang rasional. Tetapi pada tataran "Grassroot" konvergensi antara suku bangsa, agama yang berbeda tidak mudah diciptakan, walaupun ada (yang sudah terbentuk) bisa ditelusuri, bahwa realitas semacam itu berakar pada tradisi yang sudah cukup lama, ketika intervensi state belum terlampaui banyak mempengaruhi mereka.

Dalam konteks yang demikian integrasi dan konflik menjadi semacam dua sisi dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia yang tidak mudah ditiadakan satu sama lainnya. Sebab itu agar masing-masing lebih banyak menyumbang sisi positifnya (integratif) dibanding sisi destruktifnya maka diperlukan upaya dialog yang berkelanjutan. Dengan dialog itu berarti kita membuka sekat-sekat budaya primordial yang secara psikologis mengungkung kita.

TARIK ULUR ANTARA KONFLIK DAN INTEGRASI

Konflik dalam hubungan terutama antar etnis, agama dan golongan sebenarnya merupakan kenyataan yang wajar dalam kehidupan masyarakat, lebih-lebih dalam masyarakat Indonesia dengan populasi sekitar 200 juta orang lebih. Namun menurut Nasir (1993) kenyataannya menunjukkan bahwa bersamaan munculnya konflik timbul pula proses integrasi yang mengarah kepada penataan kembali satuan-satuan sistem sosial dalam masyarakat dimana antar suku bangsa, pemeluk agama itu hidup berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat.

Dengan menerima realitas konflik sebagai kenyataan yang biasa tidak lain ini disebabkan masyarakat Indonesia itu sendiri yang pluralistik adanya disamping pula faktor agama-agama besar yang bersifat ofensif. Jelas ini menunjukkan bahwa peluang terjadinya benturan-benturan kepentingan bersifat kompleks. Namun demikian hal ini tidak serta merta mengarah kepada terjadinya gerakan sentrifugal yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian. Pada tataran selanjutnya antara suku bangsa, antar agama selalu muncul tindakan yang mengarah kepada proses integrasi yang menekankan penyatuan kembali satuan-satuan sosial dalam masyarakat.

Sebab itu dalam setiap masyarakat senantiasa adanya pola-pola hubungan sosial antara lain diwujudkan dalam proses interaksi menurut Garang (1985) adalah proses peleburan semua jalur sistem sosial yang ada ditengah masyarakat hingga terwujud satu sentrum sebagai identitas dan pola orientasi bersama. Sementara konflik menurut

Saifuddin (1986) adalah pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.

Dengan demikian konflik dan integrasi merupakan proses dan aspek yang melekat dalam struktur kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai satu system yang terdiri atas peranan dan kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan sosial bukanlah hal yang statis, tetapi cenderung berkarakter dinamis. Relasi social yang terbangun pun amat mengekspresikan kenyataan-kenyataan obyektif tersebut. Karena gejala yang wajar terlebih lagi jika dalam masyarakat tersebut juga mengalami perubahan sosial sekaligus perubahan kebudayaan. Tidak ada satu masyarakat pun yang dalam proses perkembangannya tidak mengalami adanya konflik social. Hal itu disebabkan oleh antara lain bahwa manusia sebagai makhluk social tidak dapat hidup terus-menerus dalam suatu ketertaturan dan ketertiban abadi.

Olehnya itu menurut Ismail (1993) dalam hubungan social antar suku bangsa, antar agama dan antar golongan, dapat terjadi penyesuaian untuk menghindari pertentangan dan supaya dapat hidup berdampingan dan saling memberi imbalan atau pengorbanan, baik secara materi maupun secara social.

Adanya hubungan positif negatif ini juga menunjukkan adanya hidup rukun, tidak rukun. Pada titik inilah bias dielaborasi lebih jauh bahwa hubungan antar suku bangsa, Agama dan antar golongan menjadi bertendensi konflik atau berintegrasi, sejauhmana mereka menyadari makna penting *Togetherness Spirit* dalam interaksi sosialnya. Jika roh kebersamaan itu dijauhi, maka konfliklah yang terjadi, namun bila roh tersebut menjadi tarikan nafas kehidupan mereka, maka lekatan integrasi pun akan menjadi kokoh.

Menurut Suparlan, ada 6 (enam) hal yang perlu dicermati, berkaitan dengan terminologi rukun tersebut :

- Pertama*, tidak ada kontak hubungan, masing-masing tidak peduli karena mempunyai kesibukan-kesibukan dan kegiatan sendiri-sendiri;
- Kedua*, adanya hubungan yang informal dan spontan melalui system kekerabatan, kekeluargaan, pertemanan, hobi dan hubungan-hubungan pribadi lainnya seperti merasa behutang budi;
- Ketiga*, adanya hubungan formal melalui upacara nasional, sosial atau lokal.
- Keempat*, adanya hubungan kerja yang saling menguntungkan;
- Kelima*, karena adanya aturan pemerintah atau perintah atasan dan;
- Keenam*, adalah factor-factor lain karena pemahaman ajaran agama, tradisi dan kebiasaan, adanya interest ekonomi, takut dikucilkan dan lain-lain.

Sementara tak rukun menurut Nahrurwi dapat dilihat pada :

Factor curiga dan prasangka lama, sikap eksklusif suku-suku bangsa yang ada, kelompok-kelompok agama, persaingan atau perebutan pengaruh keagamaan, politik, social dan perbedaan pendapat dalam beberapa masalah.

Bentuk rukun dan tidak rukun dapat dilihat dalam bidang kegiatan ekonomi, politik, kekeluargaan, kekerabatan, upacara linkaran hidup tradisi dan kebudayaan setempat, kesenangan dan hiburan pendidikan dan lain-lainnya.

Berkait dengan itu, menurut simmel, dijelaskan bahwa konflik dalam suatu masyarakat terkait dengan berbagai proses yang mempersatukan dalam kehidupan social dan bukan sekedar lawan persatuan atau integrasi. Konflik dan intergrasi dengan demikian, dapat dilihat sebagai bentuk lain dari sosiasi (yaitu proses dimana masyarakat itu terjadi yang meliputi interaksi timbal balik) yang satu tidak lebih penting atau lebih mutlak dari yang lainnya. Tetapi bagi Simmel, meskipun konflik merupakan gejala alamiah dan tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat, konflik itu tidaklah harus berkepanjangan sekurang-kurangnya dalam bentuk lahirnya.

PERMASALAHAN DESINTEGRASI

Konflik berdimensi etnisitasi yan ditandai dengan melemahnya semangat integrasi, dan ditandai dengan menguatnya solidaritas dan loyalitas primordial berdimensi politik, tak jarang dapat menggiring suatu bangsa yang majemuk kedalam sikap bermusuhan dikalangan mereka. Akhirnya kesemuanya itu bermuara kepada desintegrasi (kehancuran, perpecahan, artinya tidak berfungsinya masing-masing bagian dalam suatu sistem sosial, tidak mempunyai hubungan timbal balik yang pas, sehingga karena itu tidak membentuk keseluruhan). Kalau dijabarkan dalam pengertian sehari-hari maka **desintegrasi** bangsa itu adalah tidak terpadu dalam keragamannya artinya terakumulasi kesenjangan-kesenjangan yang dirasakan dan diamati dalam kehidupannya sehingga membuat warga masyarakat terkotak-kotak. Hal ini menjadi sumber masalah bagi bangsa dan negara yang pada akhirnya dengan tuntutan pembagian wilayah sehingga memungkinkan munculnya nation baru yang lebih homogen.

Apa peduli kita terhadap lepasnya Timor-Timor ataupun Aceh yang dilanda tragedi? Tentu saja kita harus peduli dengan kedua wilayah itu. Ketika penyelesaian politik dan militer terperangkap kedalam situasi desintegrasi (sebenarnya ingin dihindari itu) karena lebih mengutamakan pendekatan kekuatan dan kekuasaan. Tentulah orang-orang akan mencari-cari solusi kebudayaan. Orang akan mencari cara untuk merangkul bahu rakyat yang hatinya sedang terluka. Orang akan mencari-cari ciri-ciri kulturalnya; apa yang mereka mau, apa yang membangkitkan percaya dirinya, apa yang bisa membangkitkan empatinya kepada negara indonesia. Disitulah diperlukan pengetahuan tentang budaya suatu suku bangsa, bukan hanya untuk kepentingan integrasi politik nasional, lebih lagi guna integrasi cultural atau mungkin lebih tepat lagi adalah reintegrasi cultural”; membuhul kembali benang merah pengikat kebangsaan secara cultural.

Dalam kajian budaya cenderung melihat bahwa tindakan individu ataupun kelompok individu dalam hidup bermasyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. ”menghujat orang bukanlah budaya

bangsa kita”, ”kita tidak mengenal budaya mundur bila masa jabatan berakhir,” membuat kerusuhan bukan nilai budaya bangsa kita”

Dari contoh diatas dapat diartikan bahwa perilaku tertentu dalam masyarakat ditentukan dan dipengaruhi oleh : orientasi nilai-nilai budaya yang ditentukan oleh pranata-pranata primodial dan ikatan kekerabatan, meyakini ikatan sosial adat karena mengaku sama-sama berasal dari daerah yang sama, memiliki persilangan darah yang sama sumbernya; melintasi dan meniadakan perbedaan asal-usul agama dan ras; aturan-aturan agama, khususnya ajaran agama-agama besar yang memiliki umat dan pengikut; dan **orientasi nilai kepada aturan-aturan hidup secara nasional** yang biasanya dikembangkan dalam bentuk pranata-pranata politik dan ekonomi. Bila ada penyimpangan perilaku pada individu atau kelompok individu maka hal itu adalah ulah oknum tertentu, bukanlah suatu sistem atau nilai yang dianut masyarakat luas.

Apakah menjarah dan membakar milik orang lain adalah kebudayaan, yang mengesalkan, jum'at kliwon pun mereka beroperasi pada hal seseuai tradisi tidak boleh menangkap ikan, ujar seorang nelayan, ”mereka” yang dimaksud dalam kasus ini adalah para nelayan atau perahu Trawi milik Taoke Cina yang berasal dari bagan siapi-api (Peristiwa kerusuhan di Cilacap, sept 1998). Dari contoh ini tampak nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat menjadi salah satu pemicu suatu tindakan sosial, terlebih lagi sasarannya adalah orang luar atau orang-orang yang dianggap pendatang yang melecehkan warga masyarakat setempat. Pendatang adalah orang lain, dalam setiap kebudayaan selalu dikenal dengan kelompok kita (we) dan kelompok mereka (they).

Dalam konteks masyarakat Indonesia secara menyeluruh konflik (bernuansa sara', antara kita dan mereka) dapat terjadi antara yang merasa pribumi dan non pribumi, antar suku dan agama). Tetapi dalam konteks yang lebih kecil dapat terjadi konflik seperti peristiwa Sanggau ledo (kalbar) antara Etnik Madura dan dayak, peristiwa belum lama juga terjadi di Luwu Sulsel (12/9 1998) antara Dusun (Baebunta dan Rante malino), dimana warga Baebunta yang merasa penduduk Asli membumi hanguskan Dusun Rante malino yang dinilai sebagai pendatang (Surya 15 Sept.1998)

Contoh-contoh lain penggolongan kita dan mereka misalnya pensiunan ABRI tidak bergabung ke Partai Politik yang bersebrangan dengan pemerintah”. Demikian seorang tokoh masyarakat ketika berbicara di layar TV, artinya ada partai yang mendukung pemerintah dan ada yang anti pemerintah. Ada gerakan-gerakan kelompok sekuler (sebagai lawan dari kelompok Religius) yang ingin menggulingkan pemerintah yang syah. Demikian seorang tokoh yang lain dalam siaran berita TV pula.

Sekarang ada partai ”Hairam” alias halal tapi haram. Atau halal dan haram bercampur menjadi satu, sehingga sulit membedakan apakah partai tersebut sesuai dengan keinginan umat islam atau tidak. Partai ini biasanya beralih demi kebangasaan dan keterbukaan lalu susunan kepengurusannya bercampur antara islam dan non islam. Mengenai partai begini, umat islam harus hati-hati, demikian kata seorang tokoh masyarakat (pewarta Siang, 18 September 1998).

Munculnya konflik antar agama, kerap disulut pertarungan politik atau oleh ketidakmauan/ kekerasan hati agama-agama lama itu untuk menerima penetrasi 'agama baru', agama baru secara cepat dituduh sebagai pembawa ancaman terhadap kemungkinan runtuhnya kedaulatan wilayah / ruang kedaulatan Agama tertentu. Terjadinya konflik antara islam dan Kristen soal pendirian, penggunaan rumah ibadah sebagaimana hasil temuan penelitian ismail, tidak semata-mata persoalan doktrin, tetapi lebih pada persoalan karena tokoh islam merasa kepentingan islam terancam dan dirugikan, dilampauinya peraturan pemerintah khususnya yang mengatur pembangunan dan pemakaian rumah ibadat, kurang eratny pendekatan antar tokoh agama dari luar sehingga kurang dapat berintegrasi dengan kehidupan masyarakat setempat.

Bagaimana penjelasan dari sisi pendekatan budaya bila kerusuhan dan penjarahan itu terjadi dalam desa yang sama atau pada masyarakat yang memiliki budaya yang sama. Temuan sangat menarik pada beberapa waktu lampau, yang menyebutkan bahwa ada perasaan dan pikiran yang berkembang dalam suatu kebudayaan tertentu terutama masyarakat yang mayoritas masih hidup di pedesaan menganggap bahwa jumlah barang yang ada dan dapat diperoleh dari kerja keras sangat terbatas yang disebut "*Image Limited Good*" artinya bila disebuah desa atau tempat sudah ada orang yang sukses hidupnya terutama dalam bidang ekonomi, maka anggota masyarakat yang lain walaupun sudah bekerja keras tidak akan mendapatkan kesuksesan yang sama, karena apa yang dicapai sudah diambil oleh orang yang sukses tadi. Hal ini terkait dengan faham bahwa jumlah benda termasuk jasa itu terbatas, sehingga bila ada orang lain yang sudah mengambilnya maka saya tidak akan mendapatkan hal yang sama, paling-paling mendapatkan sisa atau bahkan tidak sama sekali. Karena jumlah sumber daya yang serba terbatas itu, maka bila masyarakat yang merasa dirinya kurang beruntung, bolehlah mengambil sedikit bagiannya dari orang yang lebih beruntung. Penjarahan oleh warga masyarakat yang terhadap harta benda dipusat-pusat pertokoan, penjarahan kayu milik "Negara", dan penjarahan-penjarahan modus lain selama ini mungkin termasuk tindakan yang terpengaruh oleh faham *Image of Limited Good* ini.

Realitas sosial yang terjadi dan temuan penelitian yang dikutip ini secara jujur harus diakui bahwa itu belum mencerminkan realitas obyektif yang sesungguhnya. Namun ada pretensi umum bahwa problematika pluralistik bangsa ini tidak akan terlalu jauh dari titik singgung yagn amat rentan sensitive. Realitas itu kita terima dalam beradaban kita (terutama setelah terjadinya peristiwa-peristiwa besar yang melibatkan suku-suku bangsa dan agama akhir-akhir ini) yang berarti ikatan solidaritas sebagai warga bangsa yang cenderung melonggar, persaingan social yang semakin meningkat, ketidakmampuan kita untuk mengelola, memenuhi keperluan-keperluan untuk kehidupan yang harmonis, layak menurut kemampuan budi-days masing-masing warga masyarakat, pada ketiadaan rasa solidaritas, ketiadaan benda-benda untuk keperluan hidup.

Dalam tulisannya mengenai heterogenitas politik suku bangsa di Indonesia, William Liddle (1970) mengidentifikasi ada dua jenis penghalang integrasi nasional, ialah :

Pertama, yang berakar pada dimensi pembelahan horizontal; dan

Kedua, pada tingkat pertikaian berupa perbedaan latar belakang pendidikan elite kota yang berpendidikan, dan masa pedesaan yang berpandangan tradisional.

Jonathan Friedman (1994;122) mengemukakan bahwa dalam era globalisasi, setiap kelompok etnik ingin menunjukkan identitasnya dan melepaskan diri dari ikatan kebangsaan yang dapat merugikan kepentingan kebudayaannya.

Demikian pula era reformasi yang telah digulirkan telah melahirkan suasana demokrasi yang sebenarnya dan memberikan ruang besar kepada individu, golongan dan kelompok etnik untuk berani mengemukakan pendapat dan menuntut hak azasi yang telah lama dirampas oleh orde baru.

Dalam realita berbagai interaksi sosial dikalangan suku-suku bangsa, mereka tidak berada pada suatu posisi yang sama. Ada suku-suku bangsa tertentu yang menduduki posisi sebagai kelompok dominan dan memiliki hak-hak istimewa, dan sebaliknya ada juga suku-suku bangsa yang ada pada kelompok subordinat. Untuk lebih memahami permasalahan disintegrasi pada masyarakat Indonesia maka secara umum dapat disebutkan :

Kemungkinan penyebabnya secara garis besar adalah :

1. Sebab dari dalam diri sendiri yaitu yang menyangkur kemampuan internal atau kualitas pribadi manusia. Hal ini kadang terjadi dari sistem pemahaman dan interpretasi yang kurang tepat terhadap sistem nilai budaya, sehingga menjadi rujukan perilaku yang fatalistik, tidak saling menghargai martabat masing-masing, tidak saling mengetahui dan menghargai identitas individu, penggunaan bahasa yang tidak proporsional, menonjolkan/ mengagung-agungkan filosofi suku bangsanya ditenga-tengah perkauman lainnya, lemah wataknya bangsa Indonesia: dikuasai oleh indoktrinasi dan pemujaan terhadap materi.
2. Sebab Kultural, Ykni yakni yang menyangkut pandangan nilai dan sikap mental serta perilaku masyarakat. Hal ini tumbuh dari sistem nilai budaya yang menghargai cara-cara kehidupan yang menghindari kesenangan dan keharmonisan hidup duniawi. Orang atau kelompok yang demikian itu menghindari dari tekanan hidup duniawi dengan memilih melakukan kegiatan-kegiatan yang selalu meresahkan masyarakat dan akhirnya membawa dampak pada kesengsaraan orang banyak. Nilai budaya yang dianutnya semakin melonggar baik sebagai akibat perubahan sosial yang melanda hampir semua aspek kehidupan maupun kurang fungsionalnya tokoh-tokoh agama dalam mengekspresikan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Tidak saling mengenal dan saling menghargai kebudayaan kelompok etnis masing-masing, tidak diterimanya nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat, penggunaan bahasa daerah yang tidak proporsional, dan yang tidak kalah

parahnya adalah sikap ekspolifis dikalangan suku-suku bangsa tertentu yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan bagi perkauman yang lain.

3. Sebab Struktural, artinya ada struktur kekuasaan yang memberikan runag/peluang bagi lahirnya desintegrasi bangsa seperti rendahnya legitimasi pemerintahan, kekacauan ekonomi, tingginya represi, banyaknya pelanggaran HAM dan ketidakadilan pemerintah pusat dalam memperlakukan daerah terutama persoalan keuangan daerah, porsi pembangunan yang kecil, penempatan aparat pemerintah yang tidak memperhatikan dan tidak memperhitungkan elit-elit local, penyalahgunaan kekuasaan dan hukum, pertarungan misi antar segenap unsur kekuasaan, penataan ruang kota tanpa memberdayakan warga masyarakat lokal yang tergusur, pembangunan prasarana umum (pasar) yang cenderung tidak memperhatikan kemampuan warga lokal, serta pembangunan berbagai fasilitas umum yang menimbulkan dampak rusaknya kebudayaan lokal.

Para terakhir tahun 1990-an bangsa indonesia memang ada dalam ujian yang amat berat. Disharmoni yang cenderung melecehkan kita sebagai bangsa yang bermoral ternyata hampir menyebar diseluruh tanah air. Simbol-simbol pembinaan dan pembentukan watak anak bangsa dengan mudah dihancurkan tanpa rasa bersalah dan berdosa. Masjid, gereja, vihara/klenteng dan sekolah-sekolah, bahkan tanaman yang menjadi sumber kehidupan dibumi hanguskan begitu saja. Untuk menciptakan/membangun integrasi bangsa yang hakiki dimasa depan maka perlu penataan kembali berbagai kebijakan yang telah dilakukan selama ini dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dan porsi yang adil kepada daerah, saling mengenal dan menghargai identitas individu masing-masing dan menggunakan bahasa (daerah) secara proporsional.

Kepada Siapa Kita Mengadu ?

PENUTUP

Indonesia dimasa depan adalah indonesia yang amat bermasalah. Melihat abad ini seakan kita melihat tumpukan beban yang amat memematkan. Bahaya desintegrasi, isolasi internasional mengancam. Badut-badut politik bergentayangan. Agama sebagai benteng terakhir patokan moral bersandar dalam situasi apapun harus tetap menjadi pegangan anak bangsa negeri ini. Tulisan ini merekomendasikan satu kata kunci kendalikan diri sendiri. Hubungan yang harmonis antara warga masyarakat bisa dimulai jika dalam hati kita bersemi benih-benih pengendalian diri untuk tidak melukai orang lain dalam tutur kata terlebih dalam perbuatan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Doyle, Paul Johnson, (1986). *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jakarta Gramedia,
- Friedman, Jonathan, (1944). *Cultural Identity And Global Proses*, London: SAGE Publication Ltd.
- Garang, J.Prisma (1985). pilihan Artikel Prisma, Jakarta
- Ismail, Nawawi., *Pola Hubungan Sosial Tokoh-tokoh Agama dalam rangka kerukunan Umat beragama, kasus dikelurahan cigugur tengah, cimahi jabar* (dalam Sintesis Vol.1 No 1 tahun 1983).
- Nashir, Haedar,(1983). *Proses Integrasi Dan Konflik Dalam Hubungan Antar Pemeluk Agama. Kasus Dikelurahan Babakan Bandung*, Sintesis Vol I No.1 tahun 1983
- Purwanto, Hari, (1988). *Integrasi Nasional Dan Kasus Banyuwangi: Perilaku Dan Sikap Politik Di era Redormai*, Wacana Antropologi, Nop-Des, 1988.